



PRIHATIN PENGGELEMBUNGAN SUARA Garda Ajarkan Matematika pada KPU

YOGYA (KR) - Prihatin kondisi bangsa dengan penghitungan suara hasil Pemilu 2024 yang dinilai melenceng, kelompok masyarakat yang bernaung dalam Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) menggelar aksi teatrical, Selasa (20/2) di halaman KPU DIY Jala Ipda Tut Harsono Timoho Yogyakarta. Garda menggelar pelajaran matematika yang baik dan benar sebagai bentuk kritik pada praktik penggelembungan suara dalam sistem rekapitulasi suara KPU.

"Komisioner KPU kami undang mengikuti pelajaran matematika. Sejumlah buku-buku pelajaran matematika kami serahkan kepada KPU agar semakin cerdas dalam penguasaan ilmu matematika sehingga dapat melakukan penghitungan rekapitulasi suara dengan benar," tutur Korlap Aksi Agus 'Becak' Sunandar.

Peserta aksi berorasi menyampaikan aspirasi. Mereka menggunakan seragam SD, mengatasnamakan SDN Koplak, menyatakan ketidakpuasan dengan kinerja KPU dalam menghitung suara hasil pemilu 14 Februari. "Unjuk rasa teatrical sebagai bentuk ketidakpuasan kinerja KPU juga Bawaslu," tandasnya

Disebutkan proses awal Pemilu 2024 sudah diawali preseden buruk di mana Sidang Mahkamah Konstitusi dan sidang Dewan Kehormatan KPU memutuskan MK serta KPU telah melakukan pelanggaran berat etika dan moral dalam proses pendaftaran cawapres sang putra Presiden. "Berbagai preseden negatif juga muncul seperti mobilisasi perangkat desa untuk mendukung paslon tertentu, presiden tanpa rasa malu menabrak aturan untuk netral,

* Bersambung hal 7 kol 1



Aksi teatrical Garda mengajarkan Matematika di Kantor KPU DIY, Selasa (20/2/2024).

Garda

Sambungan hal 1

melakukan politisasi bansos, keterlibatan pejabat publik berkampanye, termasuk adanya intimidasi aparat," jelasnya

Kemudian kisruh penggelembungan penghitungan suara. "Sistem rekapitulasi suara KPU (Sirekap) yang tiba-tiba secara ajaib melonjakkan suara pa-

sangan tertentu bahkan banyak kasus ditemukan perolehannya melampaui jumlah pemilih. Sirekap pun diplesetkan publik sebagai Simark-up. Semua hal itu dilakukan terstruktur, sistematis dan masif," ungkapnya

Aktivis 98 Widihasto Wasana Putra menambahkan Gerakan Reformasi

1998 salah satunya mengamankan penguatan instrumen hukum dan penguatan kelembagaan demokrasi dilandasi semangat antikorupsi, kolusi serta nepotisme termasuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. "Kini secara terang-terangan dicerai pemerintah Jokowi," tandasnya. (Vin)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005